



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

KANTOR BUPATI GRESIK



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2024





PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

KANTOR BUPATI GRESIK



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2024



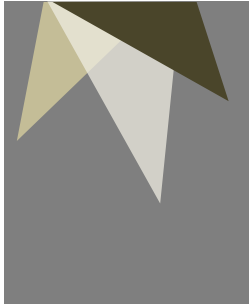


**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

**Judul : RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK - TAHUN 2025**

Penanggungjawab:
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

2024



kata pengantar



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat *Allah subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-*Nya*, sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik ini dapat terselesaikan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan ini merupakan penjabaran dari dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Gresik untuk tahun 2025.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan (PK) Kabupaten Gresik ini pada intinya berisikan strategi, program dan kegiatan hingga sub kegiatan yang hendak di capai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Termasuk juga lokasi prioritas berdasarkan kecamatan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut serta secara aktif dalam proses penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan ini kami mengucapkan terima kasih, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih memihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.

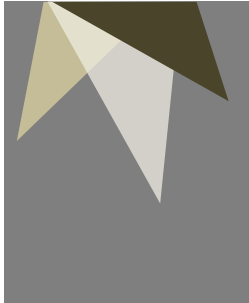
Gresik, September 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Selaku
Sekretaris TKPK Kabupaten Gresik

EDY HADISISWOYO, S.H., M.M

Pembina Utama
NIP. 19680503 199703 1 011





daftar isi

DAFTAR ISI

	Halaman:
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika	7
Bab II Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Sebelumnya ..	8
2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Gresik	8
2.2. Kondisi Capaian Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan ...	12
2.3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023	14
Bab III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan	17
3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan	16
3.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik	22
3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024	29
3.4. Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2024	40
Bab IV Rencana Aksi Tahunan	44
4.1. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025	44

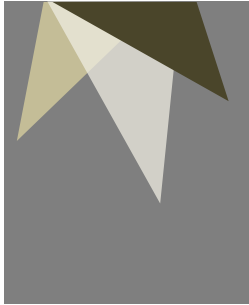


4.2. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025	51
4.3. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025	53
Bab V Penutup	85

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran





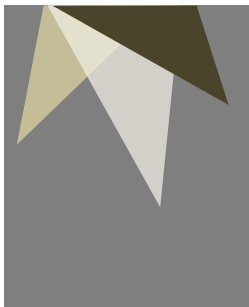
daftar tabel

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 2.1. Perkembangan Capaian Indikator Kemiskinan Non Konsumsi, Tahun 2019-2023	12
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023	15
Tabel 3.1. Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan	24
Tabel 3.2. Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik 2024	30
Tabel 3.3. Sebaran Jumlah Keluarga dan Individu P3KE Kab. Mojoketo	42
Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik 2025	54
Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.....	83



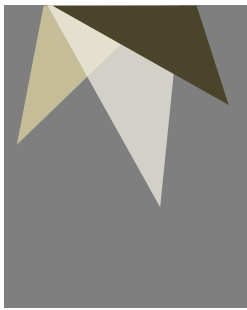


daftar gambar

DAFTAR GAMBAR

	Halaman:
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik Tahun 2015-2024	2
Gambar 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023	8
Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023	9
Gambar 2.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik, Tahun 2019-2023	10
Gambar 2.4. Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2023	11
Gambar 3.1 Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024	18
Gambar 3.2 Upaya Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	41
Gambar 4.1 Konsep Pentahelix dalam Penanggulangan Kemiskinan	48
Gambar 4.2 Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Individu Miskin	51
Gambar 4.3 Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Keluarga Miskin ..	52





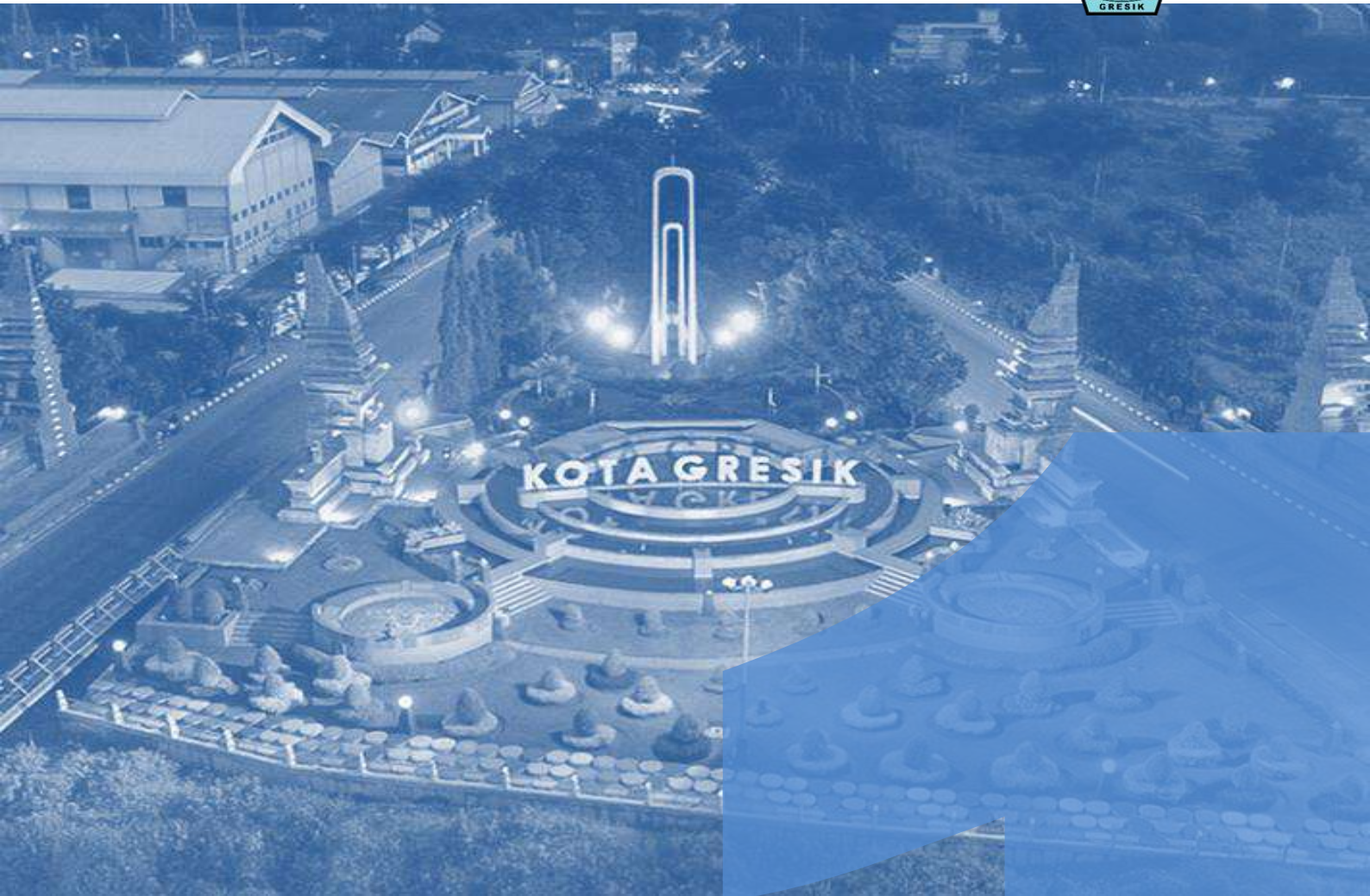
daftar singkatan

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKABA/AKBA	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
APtS	: Angka Putus Sekolah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ART	: Anggota Rumah Tangga
BDT	: Basis Data Terpadu
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KRTP	: Kepala Rumah Tangga Perempuan
LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	: Peraturan Presiden
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri



PKH	: Program Keluarga Harapan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPFM	: Program Penanganan Fakir Miskin
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RT	: Rumah Tangga
RTM	: Rumah Tangga Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka





PENDAHULUAN

dokumen

RAT PK 2025 Kab. Gresik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

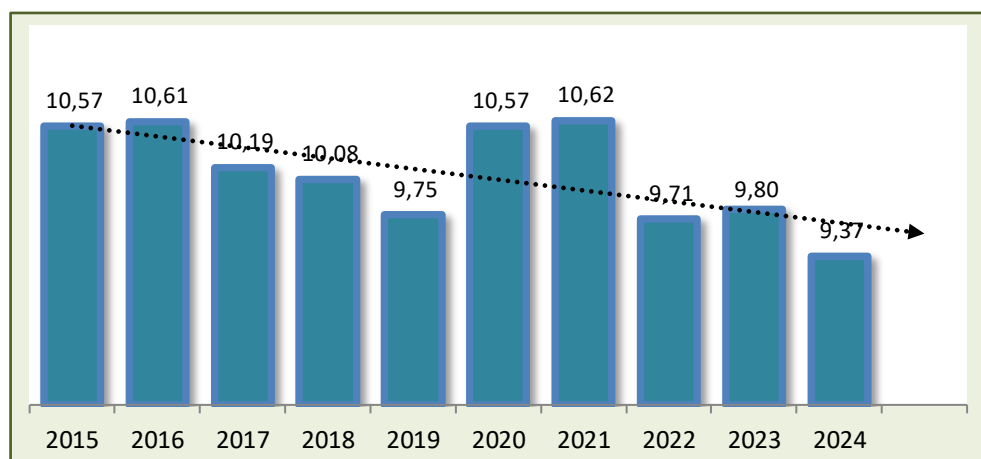
Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Mirisnya, kondisi ini merupakan potret rakyat kecil di Indonesia. Mereka tertatih-tatih membiayai hidup yang semakin mahal di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui program-program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya

adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasar garis kemiskinan yang berfluktuasi dengan capaian tahun 2024 turun terhadap capaian tahun 2023, dan menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan tren menurun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 10,57 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 9,37 persen.

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik, Tahun 2015-2024



Sumber: Publikasi BPS. data di olah.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik, maupun program-program yang pendanaannya *sharing* dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah individu/rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Kabupaten Gresik pada tahun 2020 telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode Tahun 2021-2025. Dan sebagai tindak lanjut dari telah disusunnya dokumen RPKD tersebut, maka perlu disusun dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik adalah memberi pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun program/kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah terumuskannya program dan kegiatan berikut indikator dan

target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2025.

1.3. Landasan Hukum.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengacu pada regulasi-regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4844) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor), yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No-mor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

1.4. Sistematika.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun
 Sebelumnya.
- Bab III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan
- Bab IV Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan
 Tahun 2025
- Bab V Penutup





PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA

dokumen

RAT PK 2025 Kab. Gresik

BAB II PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA

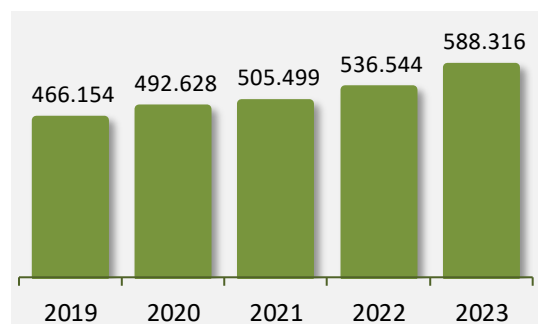
2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Gresik.

2.1.1. Garis Kemiskinan.

Dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan gambar di samping yang menunjukkan bahwa garis kemiskinan selama kurun waktu tersebut

Gambar 2.1
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023



Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

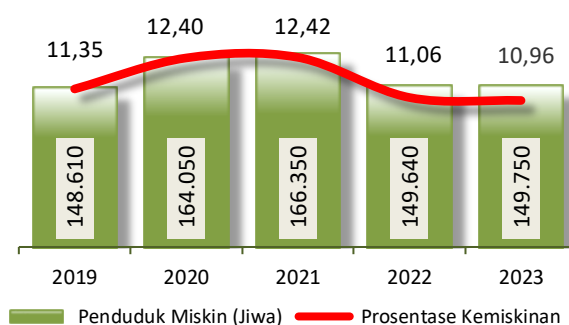
terus meningkat. Dari Maret 2019 hingga Maret 2023, garis kemiskinan Kabupaten Gresik naik sebesar Rp. 122.162 yaitu dari Rp. 466.154 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi sebesar Rp. 588.316 per kapita per bulan pada Maret 2023.

2.1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.

Seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pengeluaran) di bawah garis kemiskinan akan disebut sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2023 adalah sebanyak 149,75 ribu orang, turun sebanyak 110 orang dibandingkan jumlah penduduk miskin Maret 2022. Dengan demikian persentase penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 10,96 persen atau menurun 0,10 persen poin terhadap Maret 2022.

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik menunjukkan pola perkembangan Gambar 2.2

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023



Sumber: Publikasi BPS- data di olah

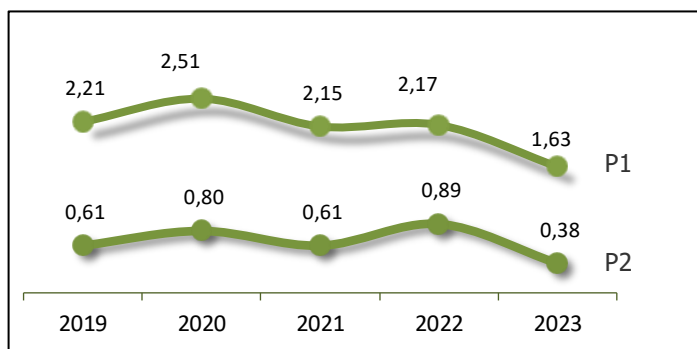
antar waktu dengan ke cenderungan tren sedikit meningkat, sedangkan persentase penduduk miskin menampilkan ke cenderungan tren yang menurun.

2.1.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2023 adalah sebesar 1,63 mengalami penurunan sebesar 0,54 poin jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2022. Sementara itu Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2023 adalah sebesar 0,38 mengalami penurunan sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2022.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama periode tahun 2019-2023,

menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif dengan tren yang cenderung menurun.

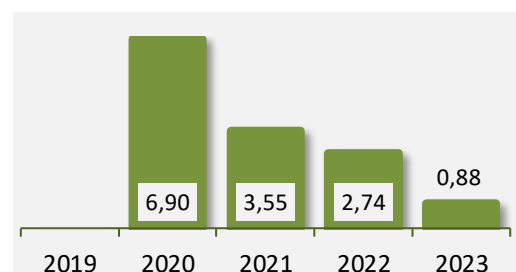
2.1.4. Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp 10.739,- per orang per hari atau Rp 322.170,- per orang per bulan.

Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Penduduk miskin umum memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Gresik tidak lebih dari Rp. 588.316,- sedangkan penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran per orang per bulan tidak lebih dari Rp. 322.170,-.

Persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah sebesar 0,88 persen, turun sebesar 1,86 poin terhadap tahun 2022. Jika terhadap tahun 2020, dimana pertama kali ditetapkan perhitungan kemiskinan ekstrem (tahun 2020 kemiskinan

Gambar 2.4
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2023



Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

ekstrem Kabupaten Gresik adalah sebesar 6,9%), maka di tahun 2023 Kabupaten Gresik telah mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 6,01 persen poin.

2.2. Kondisi Capaian Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan.

Kondisi perkembangan capaian indikator-indikator bidang terkait isu kemiskinan (kemiskinan non konsumsi) yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Infrastruktur Dasar, dan bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Capaian Indikator Kemiskinan Non Konsumsi,
Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Pendidikan:					
APM SD/MI sederajat	98,68	98,82	99,37	97,39	97,66
APM SMP/MTs sederajat	82,16	83,29	83,91	84,67	81,73
APM SMA/SMK/MA sederajat	79,14	79,71	80,48	78,07	78,07
APtS SD/MI sederajat	5,11	3,25	1,87	0,27	0,16
APtS SMP/MTs sederajat	5,27	5,12	4,33	3,32	0,17
APtS SMA/SMK/MA sederajat	8,77	6,51	5,53	4,47	0,18
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,29	9,30	9,56	9,75	10,01

Lanjutan tabel 2.1

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,72	13,73	13,77	13,96	13,97
AMH Penduduk Usia 15+	96,43	97,28	97,20	98,03	98,39
Bidang Kesehatan:					
AKN per 1000 kelahiran hidup	3,24	2,51	3,26	4,10	4,60
AKB per 1000 kelahiran hidup	3,77	2,66	3,47	4,34	4,62
AKABA per 1000 kelahiran hidup	0,29	0,05	0,05	4,40	4,80
AKI per 100ribu kelahiran hidup	82,21	59,09	315,76	94,18	79,50
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,13	0,17	0,14	0,20	0,20
Prevalensi Balita Gizi Kurang	3,01	3,62	3,11	5,90	3,70
Prevalensi Stunting	10,01	11,04	10,90	9,61	9,12
Imunisasi Dasar Lengkap	107,20	107,70	104,70	98,80	96,10
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,61	73,66	73,67	73,96	74,24
Bidang Ketenagakerjaan:					
TPAK	65,65	66,53	69,43	68,30	70,12
TPT	5,54	8,21	8,00	7,84	6,82
Penduduk <i>Idle</i>	26,44	25,67	23,27	24,33	21,84
Bidang Infrastruktur Dasar:					
Akses Air Minum Layak	97,19	94,63	88,99	91,50	98,85
Akses Sanitasi Layak	97,99	96,90	91,56	90,29	94,10
Akses Listrik (PLN, non-PLN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status Bangunan Milik Sendiri	86,92	85,01	90,63	93,07	93,14

Lanjutan tabel 2.1

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Lantai Rumah 8m ² atau lebih	93,99	95,29	97,59	96,54	96,26
Rumah Tidak Layak Huni	22,82	19,75	28,70	28,00	34,40
Bidang Ketahanan Pangan:					
Produktivitas padi (ku/th)	59,65	60,84	61,84	64,98	65,72
Prevalence of Underneorismen	3,23	4,43	4,59	6,60	3,67
Rata ² harga bahan pokok:					
▪ Beras	9.900	9.200	9.250	9.500	10.950
▪ Gula pasir lokal	11.750	12.000	12.000	12.750	16.400
▪ Minyak goreng curah	12.000	13.800	19.000	15.000	14.500
▪ Daging sapi lokal	98.500	99.500	99.500	102.500	102.200
▪ Daging ayam ras	34.000	32.750	36.500	34.500	35.750
▪ Telur ayam ras	23.500	23.750	22.750	30.000	26.950
▪ Cabai merah	22.750	37.500	36.750	27.500	80.400
▪ Bawang merah	29.000	35.000	20.750	34.750	31.200
▪ Bawang putih	28.500	25.750	25.500	22.750	35.000

Sumber: dari berbagai sumber - data di olah

2.3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	P	K	SK			
(1)	(2)			(3)	(4)	(8)
1.01 PENDIDIKAN	1	4	10	352.555.903.322,00	196.538.382.594,43	Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	2	2	18	89.548.152.860,00	89.012.677.950,00	Dinas Kesehatan, dan RSUD Ibnu Sina
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	4	8	10.625.871.620,00	7.820.536.934,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	3	5	31.162.912.979,00	27.198.004.100,00	Dinas Cipta Karya PKP
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	3	4	2.068.192.025,00	1.244.233.690,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 SOSIAL	4	5	17	15.882.645.440,00	13.521.939.321,00	Dinas Sosial
2.07 TENAGA KERJA	3	3	3	2.698.332.800,00	2.267.826.510,00	Dinas Tenaga Kerja
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	4	4	4	1.773.394.321,00	1.894.043.136,00	Dinas Keluarga Berencana, P3A
2.09 PANGAN	3	3	3	148.666.100,00	46.863.100,00	Dinas Pertanian
2.10 PERTANAHAN	1	1	1	37.456.693.900,00	12.664.068.632,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.11 LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	199.793.000,00	197.509.452,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4	4	6	96.632.600,00	95.906.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	2	6	2.484.876.480,00	2.463.168.480,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.15 PERHUBUNGAN	2	3	4	779.399.855,00	600.149.460,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	2	1.011.021.360,00	1.011.021.360,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	1	1	169.055.956,00	169.011.356,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
2.18 PENANAMAN MODAL	1	1	1	53.757.575,00	53.757.575,00	Dinas Penanaman Modal PTSP
2.22 KEBUDAYAAN	2	2	2	350.919.900,00	345.019.886,00	Dinas Pariwisata Ekrap, Budpora
2.23 PERPUSTAKAAN	1	1	2	128.592.500,00	127.343.350,00	Dinas Perpustakaan Kearsipan
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	5	8	4.636.286.995,00	3.360.339.920,00	Dinas Perikanan
3.26 PARIWISATA	2	2	2	223.486.000,00	217.975.713,00	Dinas Pariwisata Ekrap, Budpora

Lanjutan tabel 2.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	P	K	SK			
(1)	(2)			(3)	(4)	(8)
3.27 PERTANIAN	3	3	3	11.352.073.029,00	9.973.828.859,00	Dinas Pertanian
3.30 PERDAGANGAN	1	1	1	28.081.500,00	23.849.400,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
3.31 PERINDUSTRIAN	1	1	1	102.533.000,00	101.618.500,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
4.01 SEKRETARIAT DAEDRAH	1	1	1	3.941.730.600,00	3.874.440.650,00	Bagian Kesejahteraan rakyat Sekda
7.01 KECAMATAN	4	5	7	550.704.350,00	317.071.000,00	Kecamatan
JUMLAH	53	65	120	570.029.710.067,00	375.140.587.828,60	

Keterangan: P= Program K= Kegiatan SK= Sub Kegiatan

Sumber: LP2KD Kabupaten Gresik Tahun 2023, diolah



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

dokumen

RAT PK 2025 Kab. Gresik



BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki

dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Fokus kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah pengurangan beban penduduk miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen terbawah) dengan target pembangunan nasional untuk angka pengangguran ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,0-4,6 persen, dan angka kemiskinan pada tahun 2024 berada pada angka 6,5-7,0 persen. Dengan catatan, kondisi ini akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi padat tenaga kerja, dan inflasi terkendali.

Gambar 3.1
Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada pasal 16 dinyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang pada pasal 18 Permendagri No. 53 Tahun 2020 adalah:

- (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

- (3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Sedangkan sasaran penerima manfaat dari Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (Permendagri No 53/2020, pasal 19).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam era desentralisasi ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang

mencakup bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengkoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Seperti contohnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang memiliki mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur organisasi TKPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 perlu dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan

di daerah dapat tercapai dan terukur. TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-program kemiskinan. TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* (optimalisasi fungsi dan peran Pokja Pendataan dan Sistem Informasi pada TKPK). Selain itu TKPK diharapkan dapat mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi masyarakat miskin.

3.2. Starategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk strategi ke satu, yaitu *"mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin"*, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) *penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif*, (2) *perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar*, serta (3) *pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok*. Untuk strategi kedua dengan *peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif*, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan *mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan*.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka *penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan* (dalam hal ini TKPK Kabupaten Gresik) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) *penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date*; dan (2) *meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan*.

Tabel berikut memberi gambaran tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.1
Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi / Upaya	Fokus Program /Kegiatan	Fokus Pemanfaat	Fokus Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
strategi 1: <i>pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.</i>			
(1) penyempurnaan program perlin-dungan sosial;	▪ pelayanan pendidikan	anak usia 7-18 th tidak sekolah pada Desil 1 s/d Desil 4 DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1
(2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar	▪ pelayanan kesehatan	individu dgn masalah kesehatan dan kebutuhan khusus pada semua Desil pada DTKS	▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2
	▪ pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok	fokus Desil 1 dan 2 pada DTKS	▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3
			▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
(3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelom-pok	▪ perluasan akses ketersediaan pra sarana dasar	▪ rumah tangga dgn sumber air minum tak terlindungi;	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1
		▪ rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan Pam-buangan akhir tinja;	▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2
		▪ rumah tangga tanpa penerangan lis trik (PLN-non PLN) semua Desil DTKS	▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3
	▪ akses perumahan layak huni	rumah dengan kondisi RTLH pd semua Desil DTKS	▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi

Lanjutan table 3.1

Strategi / Upaya	Fokus Program /Kegiatan	Fokus Pemanfaat	Fokus Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
strategi 2: <i>peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.</i>			
peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif	▪ pembekalan kewirausahaan ▪ pelatihan ketrampilan teknis ▪ akses kemudahan usaha dan permodalan	individu tidak bekerja pada DTKS semua individu bekerja Desil 3 dan 4 DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun 2 dan 3 pd lokasi prioritas 2 dan 3 ▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
strategi 3: <i>pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.</i>			
pengembangan program penanggulangan kemiskinan (inovasi daerah) bemuansa pemberdayaan masyarakat dgn muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan	▪		pada semua lokasi
strategi 4: <i>sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</i>			
(1) penguatan sekre tariat TKPK;	▪ penyediaan peralatan; ▪ penguatan SDM sekreta riat TKPK; ▪ meningkatkan koordinasi dan monev.	---	---
(2) Peningkatan keterlibatan masya rakat.	▪ menyusun <i>directory</i> CSR ▪ Koordinasi lintas sektor.	---	---

Sumber: RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Tahun 2021-2025 adalah:

Kebijakan Umum:

1. Sinkronisasi data penerima bantuan (warga miskin) agar tepat sasaran;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial;
3. Koordinasi antar lembaga social dalam meningkatkan modal social masyarakat; dan
4. Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur.

Kebijakan khusus:

- 1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:
 - 1.1) Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;
 - 1.2) Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
 - 1.3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
 - 1.4) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
 - 1.5) Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.
- 2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:
 - 2.1) Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau;

- 2.2) Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;
- 2.3) Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.
- 3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:
 - 3.1) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;
 - 3.2) Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
 - 3.3) Peningkatan kerjasama tripartite;
 - 3.4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
 - 3.5) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
 - 3.6) Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
- 4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:
 - 4.1) Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
 - 4.2) Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;
 - 4.3) Penganekaragaman produksi pangan;
 - 4.4) Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
 - 4.5) Peningkatan perlindungan konsumen;
 - 4.6) Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.
- 5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:
 - 5.1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;

- 5.2) Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
- 5.3) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
- 6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:
 - 6.1) Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
 - 6.2) Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;
 - 6.3) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;
 - 6.4) Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
- 7) Kebijakan pemberdayaan perempuan:
 - 7.1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - 7.2) Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi;
 - 7.3) Meningkatkan kepekaan social dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT dan pelecehan seksual; dan
 - 7.4) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Gresik senantiasa melaksanakan upaya secara terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengentaskan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, maka Pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya, Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semakin meningkat. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (kedalaman dan keparahan kemiskinan) juga merupakan permasalahan kemiskinan Kabupaten Gresik yang harus diminimalisasi selain menurunkan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya disajikan matrik Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik untuk Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada dokumen Rencana Aksi Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Tabel 3.2 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02	BIDANG KESEHATAN			184.587.682.786	-	3.614.911.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.			184.587.682.786	-	3.614.911.600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.			184.587.682.786	-	3.614.911.600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			42.804.000	-	1.426.181.000	Dinas Kesehatan
	➤ Pendampingan puskesmas dan FKTP lainnya dlm pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal neonatal	Semua Kec	356 Desa	-	-	32.400.000	
	➤ Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Semua Kec	356 Desa	-	-	15.300.000	
	➤ Belanja Tempat Tunggu Kelahiran (TTK)	Semua Kec	356 Desa	-	-	50.000.000	
	➤ Validasi Data KIA/ KB	Semua Kec	356 Desa	9.900.000	-	-	
	➤ Penyediaan media KIE untuk Posyandu	Semua Kec	356 Desa	-	-	30.600.000	
	➤ Surveilans dan Tata Laksana Kesehatan Ibu dan Anak	Semua Kec	356 Desa	-	-	66.300.000	
	➤ Monev KIA KB	Semua Kec	356 Desa	32.904.000	-	-	
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		-	-	1.231.581.000	Puskesmas
	- validasi Kohort dan E-kohort						
	- pendampingan bumil resti oleh kader						
	- peningkatan pengetahuan kader kesehatan dlm penurunan AKI/AKB						
	- pertemuan diskusi refleksi kasus (drk)						
	- pertemuan kelas ibu hamil						
	- pertemuan forkom p4k desa						
	- kunjungan rumah ibu hamil						
	- pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal						
	- pertemuan monev forkom p4k						
	- pendampingan bumil resti oleh kader						
	- pemantauan bumil resti						
	- orientasi kohort ibu berbasis 3e bagi nakes						
	- penguatan anc pada nakes						
	- refreshing kader tentang kspr dan pemanfaatan buku kia						
	- refreshing p4k tingkat linsek dan lintas program						
	- deteksi dini bumil resti						
	- supervisi ke desa						

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			22.620.000	-	160.831.000	Dinas Kesehatan
	➤ Surveilans pelaksanaan AMPSR (AMP Sosial)	Semua Kec	356 Desa	1.920.000			
	➤ Audit Maternal Perinatal Tk. Kabupaten	Semua Kec	356 Desa	3.450.000			
	➤ Pengkajian Kasus Hasil AMP	Semua Kec	356 Desa	6.800.000			
	➤ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan ibu bersalin	Semua Kec	356 Desa	10.450.000			
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas				160.831.000	Puskesmas
	- pendampingan bufas resti oleh kader						
	- kunjungan rumah bufas resti oleh petugas						
	- pertemuan koordinasi bidan sewilayah puskesmas						
	- supervisi fasilitatif ke desa/ kelurahan/pmb						
	- pelayanan nifas						
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			18.200.000	-	151.715.000	Dinas Kesehatan
	➤ Skrining Hypotiroid Konginital	Semua Kec	356 Desa	18.200.000	-		
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		-	-	151.715.000	Puskesmas
	- pelacakan kematian termasuk autoverbal						
	- pemantauan kesakitan neonatus termasuk neonatus resti						
	- pengambilan shk sampel ke sasaran						
	- pemantauan bayi resti						
	- kunjungan rumah neonatus						
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20.400.000	-	451.166.000	Dinas Kesehatan
	➤ Lomba Kader Kesehatan Remaja	Semua Kec	356 Desa	4.200.000	-		
	➤ Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Semua Kec	356 Desa	16.200.000	-		
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		-	-	451.166.000	Puskesmas
	- pembinaan UKS dan kader kesehatan remaja						
	- pembinaan UKS dokter cilik						
	- pelaksanaan posyandu remaja						
	- penjarangan peserta didik dan pemeriksaan berkala peserta didik						
	- pembinaan uks dan kader kesehatan remaja						
	- pembinaan KKR						
	- skrening UKS						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pd Usia Produktif			50.000.000	-	899.568.800	Dinas Kesehatan
	➤ refresing kader posbindu dalam rangka deteksi dini PTM	Semua Kec	356 Desa			16.558.000	
	➤ pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko ke institusi	Semua Kec	356 Desa			39.000.000	
	➤ pembinaan dan pendampingan teknis pelayanan konseling upaya berhenti merokok	Semua Kec	356 Desa			52.000.000	
	➤ refresing kader posbindu dalam rangka deteksi dini PTM	Semua Kec	356 Desa			20.938.000	
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		50.000.000	-	348.520.800	Puskesmas
	- deteksi dini faktor resiko ptm di posbindu						
	- penyuluhan dan pemeriksaan iva ke desa						
	- penyuluhan kesehatan tentang kb dan kespro pada pus						
	- penyuluhan peserta didik di sekolah tentang kesehatan reproduksi						
	- deteksi dini faktor risiko ptm di posbindu						
	- pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin						
	- penyuluhan dan pemeriksaan iva ke desa						
	- pelaksanaan kelas catin						
	- validasi data program usia lanjut			1.050.000			
	- jambore kader posyandu lansia			32.190.000			
	- lomba gerakan masyarakat (germas)			6.600.000			
	- monev program aru bawean			10.160.000			
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		-	-	422.552.000	Puskesmas
	- pelaksanaan home care pada lansia						
	- pemantauan lansia risti						
	- pendataan sasaran usila						
	- posyandu usila (penyuluhan & pengobatan)						
	- caregiver pjp						
	- sosialisasi perawatan jangka panjang pada lanjut usia						
	- kunjungan rumah lansia resti						
	- senam kesehatan lansia						
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			26.217.000	-	139.115.000	Dinas Kesehatan
	➤ Kegiatan PTM	Semua Kec	356 Desa	7.717.000			

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.02.09	➤ Kegiatan sertifikasi posbindu PTM/ Peringatan hari besar Kesehatan	Semua Kec	356 Desa	17.283.000			Puskesmas
	➤ Pelaporan Program PTM	Semua Kec	356 Desa	1.217.000			
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas				139.115.000	
	Kunjungan Rumah pasien Hipertensi						
	Skrining faktor risiko PTM						
1.02.02.2.02.10	Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah						Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			25.000.000	-	70.809.000	
	➤ kegiatan PTM	Semua Kec	356 Desa	25.000.000			
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas				70.809.000	
	Kunjungan Rumah pasien Diabetes Mellitus						
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			16.810.000	-	72.142.000	Puskesmas
	➤ rujukan pasien ODGJ ke RSJ/RS	Semua Kec	356 Desa	16.810.000			
	➤ PUSKESMAS	Semua Puskesmas		-	-	72.142.000	
	Kunjungan Rumah Pasien ODGJ Berat Tdk Pasung						
	Kunjungan Rumah Pasien Pasung						
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Semua Kec	356 Desa	-	-	225.094.800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Semua Kec	356 Desa	34.000.000	-	18.289.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Semua Kec	356 Desa	86.950.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Semua Kec	356 Desa	50.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kec	356 Desa	800.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kec	356 Desa	70.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kec	356 Desa	51.956.500	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kec	356 Desa	52.250.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Semua Kec	356 Desa	300.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Semua Kec	356 Desa	10.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kec	356 Desa	231.348.500	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kec	356 Desa	182.521.126.786	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.24	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Semua Kec	356 Desa	158.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.06	BIDANG SOSIAL			9.572.955.300	28.830.000	656.134.800.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			3.997.235.300	-	656.134.800.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3.997.235.300	-	656.134.800.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.01	➤ BIMTEKS SIKS-NG, Koordinasi SIKS-NG	Semua Kec	356 Desa	75.000.000			Dinas Sosial

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.05.2.02.02	➤ Koordinasi Pemutakhiran DTKS - DTKS termutakhirkan	Semua Kec	356 Desa	150.000.000			Dinas Sosial
		Semua Kec	595.524 Orang atau 210,082 RT				Dinas Sosial
	➤ Penerima Bantuan Sosial PKH	Semua Kec	41.000 RT	-	-	246.000.000.000	Dinas Sosial
	➤ Penerima Bantuan Sosial BPNT	Semua Kec	56.000 RT	-	-	134.400.000.000	Dinas Sosial
	➤ Penerima PBI-JK	Semua Kec	525.000 Orang	-	-	267.750.000.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kec	1.717 Orang	3.772.235.300	-	7.984.800.000	Dinas Sosial
	➤ PKH Inklusif untuk Lansia dan Disabilitas	Semua Kec	1.717 Orang	3.772.235.300	-	-	Dinas Sosial
	➤ BLT DBHCHT	Semua Kec	3.027 Orang	-	-	7.984.800.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			5.000.000.000	-	-	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			5.000.000.000	-	-	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			5.000.000.000	-	-	Dinas Sosial
	➤ Menyalurkan bantuan sosial anak yatim dan janda miskin	Balongpanggang	1554 Orang	310.800.000			
		Benjeng	1632 Orang	326.400.000			
		Bungah	1829 Orang	365.800.000			
		Cerme	1120 Orang	224.000.000			
		Driyorejo	1287 Orang	257.400.000			
		Dukuk Sampeyan	1542 Orang	308.400.000			
		Dukun	1487 Orang	297.400.000			
		Gresik	1722 Orang	344.400.000			
		Kebomas	1083 Orang	216.600.000			
		Kedamean	1307 Orang	261.400.000			
		Manyar	1397 Orang	279.400.000			
		Menganti	1391 Orang	278.200.000			
		Panceng	1253 Orang	250.600.000			
		Sangkapura	1371 Orang	274.200.000			
		Sidayu	1353 Orang	270.600.000			
		Tambak	1045 Orang	209.000.000			
		Ujungpangkah	1190 Orang	238.000.000			
		Wringinanom	1437 Orang	287.400.000			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			575.720.000	28.830.000	-	Dinas Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			575.720.000	28.830.000	-	Dinas Sosial

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	89 Orang x 8 Keg.	139.120.000	-	-	Dinas Sosial
	➤ Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Koordinator Puskessos Desa			139.120.000	-	-	-
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Kecamatan	1129 Orang	436.600.000	28.830.000	-	Dinas Sosial
	➤ Melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Marbot Kabupaten Gresik			225.800.000	-	-	-
	➤ Melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penjaga Makam Kabupaten Gresik	18 Kecamatan	1054 Orang	210.800.000	-	-	-
	➤ Melaksanakan Kegiatan Kencana Berdaya Karang Taruna	Panceng & Dukun	2 Kecamatan	-	28.830.000	-	-
2.07	BIDANG TENAGA KERJA				-	-	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.300.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Gresik	108 orang	1.000.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			1.000.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			300.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	110 orang	300.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			300.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.735.318.137	-	-	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			246.410.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			246.410.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			246.410.000	-	-	-
	- Pembelajaran Sekolah Perempuan Daratan dan Kepulauan, Workshop Faskom Sekolah Perempuan			246.410.000	-	-	-
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			537.500.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			337.500.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			337.500.000	-	-	-

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.2.03	- pendampingan kasus, layanan medicolegal bagi dampingan korban kekerasan, layanan psikologi bagi dampingan korban kekerasan			337.500.000	-	-	
2.08.03.2.03.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000	-	-	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			1.603.908.137	-	-	Dinas KBP3A
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			1.603.908.137	-	-	Dinas KBP3A
2.08.04.2.01.04	Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota			1.603.908.137	-	-	
	- pembelajaran sekolah perempuan daratan dan kepulauan, - workshop faskom sekolah perempuan			1.603.908.137	-	-	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			347.500.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			347.500.000	-	-	Dinas KBP3A
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			347.500.000	-	-	
	- pendampingan kasus, layanan medicolegal bagi dampingan korban kekerasan, layanan psikologi bagi dampingan korban kekerasan			347.500.000	-	-	
2.09	BIDANG PANGAN			100.000.000	-	-	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			100.000.000	-	-	Dinas Pertanian
2.09.02.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	-	-	Dinas Pertanian
2.09.02.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000	-	-	
	- belanja hibah barang pada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki SKT	Dukun (Gdg Kedoan) Dukun (Dkh Kembar)		50.000.000 50.000.000	- -	- -	
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			290.000.000	-	-	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			290.000.000	-	-	Dinas LH
2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan			290.000.000	-	-	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam penanganan persampahan melalui Bank Sampah dimana Bank Sampah terdapat Sistem penjualan persampahan non organik yang bertujuan untuk dpatnya membantu peningkatan pendapatan masyarakat		330	290.000.000	-	-	
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.651.528.000	-	-	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			500.000.000	-	-	Dinas PMD
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			500.000.000	-	-	Dinas PMD
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi sarana dan prasarana desa			500.000.000	-	-	
	- perbaikan infrastruktur dasar (fasilitasi TMMD)			500.000.000	-	-	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			7.7000.000.000	-	-	Dinas PMD
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			7.7000.000.000	-	-	Dinas PMD
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa			300.000.000	-	-	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerja sama antar desa			200.000.000	-	-	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa			7.000.000.000	-	-	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan			200.000.000	-	-	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.451.528.000	-	-	Dinas PMD
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.451.528.000	-	-	Dinas PMD
2.13.04.2.01.03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kel. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat			1.451.528.000	-	-	
	- fasilitasi BPJS ketenagakerjaan RT/RW			1.451.528.000	-	-	
2.13.05.2.01.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga			1.000.000.000	-	-	
	- operasional dan penunjang kegiatan PKK Kab. Gresik			1.000.000.000	-	-	
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			10.021.663.000	-	-	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (kb)			1.846.082.000	-	-	Dinas KBP3A
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			434.000.000	-	-	Dinas KBP3A
2.09.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja			120.000.000	-	-	

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			234.000.000	-	-	
2.09.03.2.01.08	Pengendalian program KKBPK			80.000.000	-	-	
	- audit kasus Stunting			80.000.000	-	-	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.412.082.000	-	-	Dinas KBP3A
2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.412.082.000	-	-	
	- penjarangan calon akseptor, Pendampingan pelayanan KB pada faskes oleh kader dan PKB, pelaporan			1.412.082.000	-	-	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			8.175.581.000	-	-	Dinas KBP3A
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			8.175.581.000	-	-	Dinas KBP3A
2.14.04.2.01.05	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)			8.175.581.000	-	-	
	- pendampingan sasaran catin, keluarga beresiko dan balita stunting			8.175.581.000	-	-	
3.25	BIDANG KELAUTAN dan PERIKANAN						
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			-	-	-	Dinas Perikanan
	➤ Bantuan sarana prasarana perikanan Tangkap						
	➤ Bhakti Peduli Nelayan Berdaulat (Bansos)						
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.01	Sub. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			-	-	-	Dinas Perikanan
	➤ Bantuan sarana prasarana perikanan Tangkap						
3.25.03.2.02.02	Sub. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			-	-	-	Dinas Perikanan
	➤ Bantuan sarana prasarana perikanan Tangkap						

Lanjutan table 3.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	LOKASI KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			OPD PENANGGUNG JAWAB
				APBD	APBD PROV	APBN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil ➤ Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan masyarakat			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil ➤ Pemeliharaan UPI Ikan Asap ➤ Pemeliharaan UPI Kerupuk Ikan ➤ Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan Asap ➤ Pengadaan Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ➤ Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Hibah Barang Kelompok Masyarakat Sumber Rezeki Usaha Budidaya			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ➤ Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Sarpras Kawasan Randuboto			-	-	-	Dinas Perikanan

Sumber: dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024

3.4 Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yaitu melalui upaya khusus berupa multiple intervension. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu:

- (1) Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi;
- (2) Meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan; dan
- (3) Menurunkan jumlah-jumlah kantong kemiskinan melalui perbaikan maupun pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrim banyak terdapat di wilayah tersebut. Upaya kebijakan dan pendekatan tersebut tergambarkan sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2

Upaya Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: TNP2K

Berdasarkan data pada <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran> yang diunduh pada minggu 24 September 2024 pukul 08:00 wib, sebaran sebaran jumlah keluarga dan individu P3KE Kabupaten Gresik adalah sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 3.3 Sebaran Jumlah Keluarga dan Individu P3KE Kabupaten Gresik

Kecamatan	Keluarga					Individu				
	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
010 Wringinanom	8.131	1.578	2.061	2.325	2.167	28.860	6.155	7.630	7.260	7.815
020 Driyorejo	14.463	2.929	3.699	4.155	3.680	52.998	12.064	14.025	13.522	13.387
030 Kedamean	9.081	1.831	2.237	2.799	2.214	31.248	7.061	8.271	8.221	7.695
040 Menganti	16.749	3.800	4.225	4.567	4.157	61.512	15.613	16.068	14.688	15.143
050 Cerme	8.364	1.788	2.174	2.197	2.205	31.756	7.546	8.475	7.451	8.284
060 Benjeng	7.651	1.551	1.944	2.151	2.005	28.323	6.561	7.689	6.918	7.155
070 Balongpanggang	6.491	1.425	1.652	1.750	1.664	22.926	5.664	6.007	5.616	5.639
080 Duduksampeyan	3.886	658	926	1.200	1.102	14.649	2.782	3.690	3.987	4.190
090 Kebomas	7.221	1.247	1.720	2.149	2.105	27.941	5.397	7.067	7.380	8.097
100 Gresik	7.216	1.867	1.713	2.118	1.518	26.908	7.973	6.706	6.627	5.602
110 Manyar	8.540	1.324	2.015	2.576	2.625	34.032	5.969	8.373	9.120	10.570
120 Bungah	6.879	1.611	1.703	1.866	1.699	25.830	6.602	6.698	6.260	6.270
130 Sidayu	4.105	676	996	1.167	1.266	16.271	2.964	4.124	4.290	4.893
140 Dukun	9.141	2.413	2.450	2.274	2.004	33.322	9.742	9.191	7.404	6.985
150 Panceng	7.973	2.488	2.054	1.930	1.501	28.421	9.834	7.480	5.874	5.233
160 Ujungpangkah	7.070	1.939	1.743	1.817	1.571	26.189	7.968	6.672	5.770	5.779
170 Sangkapura	11.984	6.177	2.784	2.081	942	43.690	26.497	9.490	5.073	2.630
180 Tambak	5.401	2.192	1.396	1.239	574	19.469	9.495	5.027	3.238	1.709
Kab. Gresik	150.346	37.494	37.492	40.361	34.999	554.345	155.887	142.683	128.699	127.076

* berdasarkan data P3KE 2024

TKPK Kabupaten Gresik memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan utamanya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.





RENCANA AKSI TAHUNAN

dokumen

RAT Nangkis Kab. Gresik

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN

4.1 Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Secara umum strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 tetap mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi ke satu, yaitu “mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin”, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta (3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok. Untuk strategi kedua dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan pengembangan

inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK Kabupaten Gresik) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*; dan (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan data terkait dengan indikator utama maupun indikator pendukung hingga tingkat kecamatan sebagai alat ukur dalam pengendalian capaian-capaian hasil kebijakan dan program yang diupayakan selama ini dan masa yang akan datang.

Dan yang terpenting adalah perlunya peneguhan komitmen untuk memanfaatkan basis data yang telah tersedia diantaranya DTKS

maupun data P3KE dalam perencanaan program hingga implementasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga lebih fokus penerima manfaat dan fokus pada lokasi prioritas intervensi.

Sebagai pedoman umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka dirumuskan strategi operasional sebagai berikut:

- (1) Sasaran adalah data terpadu (terdiri dari DTKS, P3KE, dan data kemiskinan daerah) yang termutakhirkan secara berkala.
- (2) Menempatkan si miskin sebagai titik sentral pemberdayaan.
- (3) Menempatkan wilayah/kantong-kantong kemiskinan sebagai sentral pengembangan wilayah.
- (4) Sumber pendanaan berasal dari pemerintah (APBN, APBD dan APBDes), CSR perusahaan, Masyarakat serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (5) Bantuan sosial terpadu dan Pemberdayaan keluarga bagi rumah tangga dan individu sasaran agar mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (6) Mendorong keberfungsian sumber-sumber layanan terdekat yang sangat dibutuhkan masyarakat miskin.
- (7) Mobilisasi keswadayaan masyarakat yang diarahkan dan berpihak pada penanganan kemiskinan: PKK, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas Sosial, Badan Amal Zakat dan Sedekah, Organisasi Sosial, dan lain-lain.

- (8) Membangun sinergi dengan stakeholder dan seluruh operator program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik (PKK, PKH, Perguruan Tinggi, LSM, program-program lain dari Pemerintah Pusat dan Provinsi).

Hal yang perlu diperhatikan agar kerja penanggulangan kemiskinan dapat berjakan dan mencapai target sebagaimana di rencanakan adalah:

- (1) memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai regulasi yang dibutuhkan;
- (2) mewujudkan data tunggal kemiskinan sebagai satu-satunya sumber data pensasaran program melalui verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data penduduk miskin (DTKS/P3KE) secara periodik; dan
- (3) meningkatkan fungsi kolaboratif antara pemerintah dengan unsur-unsur non pemerintah (akademisi, dunia usaha/CSR, masyarakat/kelompok peduli, dan media) sebagai pendekatan *pentahelix* guna memperkuat modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Konsep *Pentahelix* dalam Penanggulangan Kemiskinan.

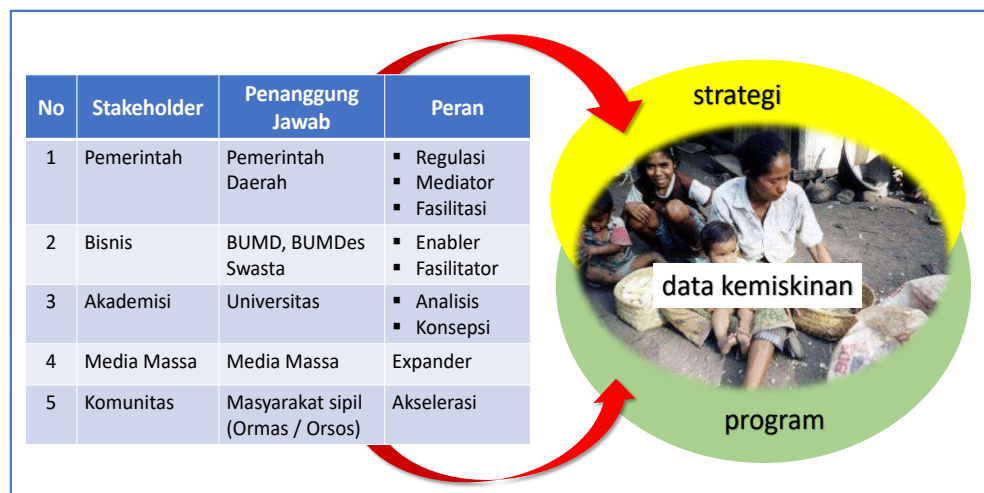
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan suatu wilayah menjadi suatu persoalan yang seharusnya ditanagani bersama-sama. Dalam suatu

wilayah, selain sektor Pemerintah juga terdapat sektor selain pemerintah, yang apabila dikategorisasi dapat terdiri dari akademisi, bisnis, masyarakat sipil (organisasi kemasyarakatan), dan media. Ke empat sektor tersebut bersama Pemerintah dapat membentuk sebuah *pentahelix* sebagai gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

Konsep *pentahelix* adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima sektor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kelima sektor tersebut adalah pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Dalam konsep *pentahelix*, setiap sektor memiliki peran penting dan saling bekerja sama untuk mengatasi masalah kemiskinan secara holistik.

Gambar 4.1

Konsep *Pentahelix* dalam Penanggulangan Kemiskinan



Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan menjalankan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemerintah juga

bertanggungjawab dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengurangan kemiskinan, seperti kebijakan pendidikan gratis, bantuan sosial, atau program pemberdayaan ekonomi.

Di sektor bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat miskin.

Melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, mengembangkan rantai pasok yang inklusif, dan berinvestasi dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan akademisi berperan dalam penelitian, inovasi, dan pengembangan pengetahuan. Akademisi dapat melakukan penelitian tentang kemiskinan, menyediakan analisis kebijakan, serta menghasilkan solusi inovatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Masyarakat sipil dapat berperan sebagai advokat dan pemangku kepentingan untuk memperjuangkan keadilan sosial, mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara Media juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi isu-isu kemiskinan, meningkatkan kesadaran publik, dan mengkampanyekan solusi. Media dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kemiskinan, menceritakan kisah-kisah yang memotivasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mempersatukan (duduk bersama) antara kelima sektor dalam suatu *pentahelix* selain semangat bersama dalam gerakan penanggulangan kemiskinan, adalah adanya “data kemiskinan” yang terverifikasi dan tervalidasi. Tentunya data tersebut bukanlah sekedar daftar nama dan alamat, tetapi berikut variabel-variabel penting lainnya (tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan/ketenaga kerjaan, kondisi rumah dan lain-lain), yang dapat menghasilkan informasi-informasi untuk dirumuskan strategi dan program penanganannya.

Melalui pendekatan *pentahelix*, semua sektor dapat bekerja sama, saling melengkapi, dan mengoptimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

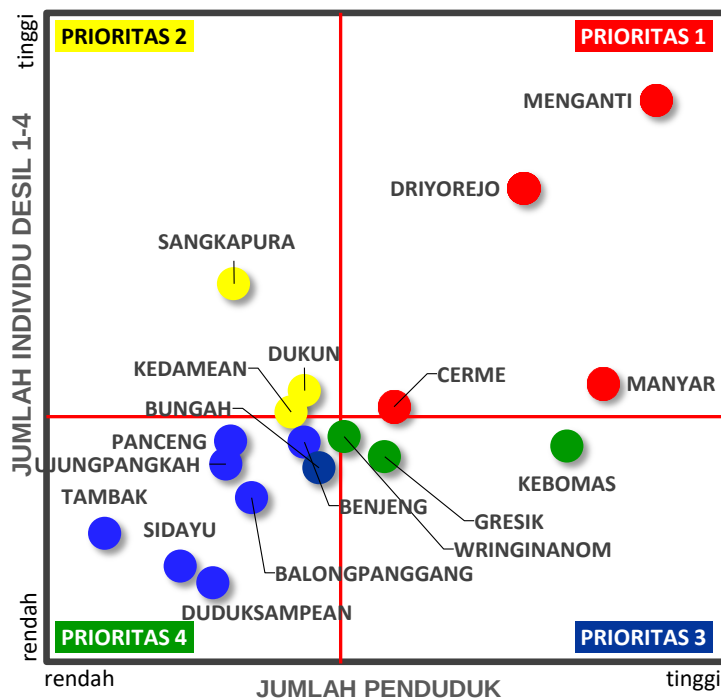
4.2 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Lokasi prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” (daerah prioritas) yang perlu segera mendapatkan intervensi (lokus intervensi) berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung.

Dengan menggunakan analisis kuadran yang mempersandingkan antara jumlah penduduk sebagai indikator x dan jumlah individu P3KE sebagai indikator y , maka akan diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.2

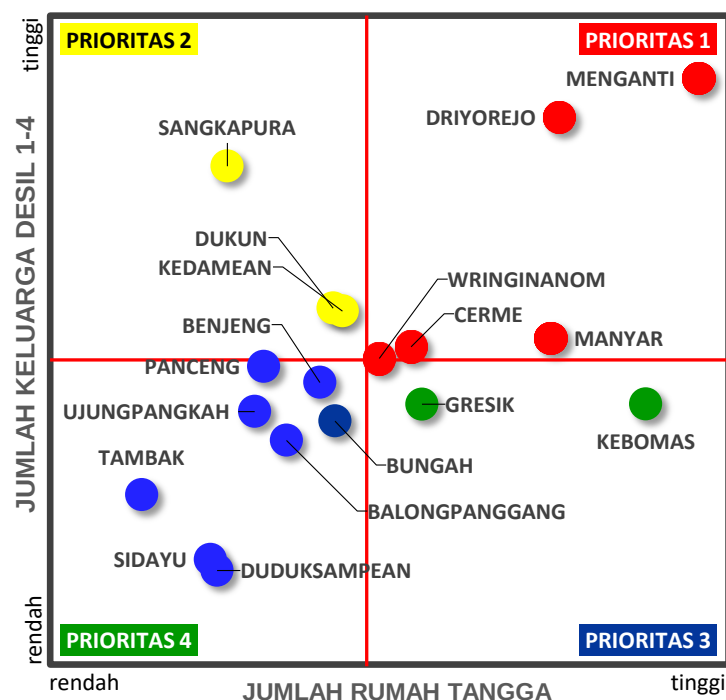
Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Individu Miskin



Sementara itu dengan mempersandingkan antara jumlah rumah tangga sebagai indikator x dan jumlah keluarga P3KE sebagai indikator y , maka akan diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.3

Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Keluarga Miskin



Sumber: BPS dan P3KE, di olah

4.3 Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan serangkaian Program dan

Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2025.

Matriks RAT PK Kabupaten Gresik Tahun 2025 disajikan berdasar bidang-bidang urusan pemerintahan dengan nomenklatur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1373 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan ini secara sekilas nampak sama dengan program dan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Program, kegiatan yang dipilih merupakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang mendukung penanggulangan kemiskinan. Dan yang terpenting dalam rencana aksi ini bukan hanya sekumpulan programnya, tetapi adalah target sasaran penerima manfaat program yang haruslah terpusat (konvergen) pada data kemiskinan (BNBA) yang telah dimiliki yang terverifikasi dan tervalidasi secara periodik.

Selanjutnya secara lebih detil disajikan tabel/matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	Bidang PENDIDIKAN			147.980.046.827	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			147.980.046.827	
1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0006	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan ruang administrasi	1 satuan pendidikan	45.347.744.826	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		389 satuan pendidikan	300.374.792	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		4 satuan pendidikan	18.987.910.000	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1 satuan pendidikan	1.461.326.347	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	rehabilitasi toilet	20 satuan pendidikan	85.714.527	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	BOSDA Swasta	445 satuan pendidikan	4.512.419.160	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			20.000.000.000	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	BOSDA Swasta	22 satuan pendidikan	37.546.478.789	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10 satuan pendidikan	5.066.077.482	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		249 satuan pendidikan	1.755.891.896	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		35 satuan pendidikan	16.127.019.411	
				14.597.490.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BOP PAUD APBD DAK NON FISIK APBN	1.627 satuan pendidikan 1.440 satuan pendidikan 4 satuan pendidikan 3 satuan pendidikan	44.909.288.000	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			3.525.039.000	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			38.881.320.000	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.872.333.000	
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangun an Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			630.596.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		3.673 satuan pendidikan 13 satuan pendidikan 13 satuan pendidikan	21.721.535.212	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			15.835.496.612	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			4.302.740.000	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			38.298.600	
1.02	Bidang KESEHATAN			115.661.352.868	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			115.661.352.868	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			115.661.352.868	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan antenatal yg memenuhi 10T meliputi: a) pengukuran berat badan dan tinggi badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan; h) tes laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling)	22.249 ibu hamil	755.038.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi	21.273 ibu bersalin	327.853.500	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan	20.226 bayi baru lahir	975.754.593	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	an kesehatan yg diberikan pd bayi baru lahir sesuai standar, yg mencakup: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yg diberikan pada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: 1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.	104.351 balita	395.953.500	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pd Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan (dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun	180.133 anak usia sekolah dasar	621.336.900	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	diluar sekolah). 3) Pemberian imunisasi Campak Rubella, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yg setara Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yg diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yg meliputi: 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan & anak; 2) skrining faktor risiko penyakit menular & penyakit tidak menular dan calon pengantin; 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian munisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil	978.056 orang	217.875.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	skrining status imunisasi Tetanus; dan 4) pelayanan KB Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi: a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; an b) skrining faktor risiko pada usia lanjut	170.925 lansia	97.895.000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes. (2) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi. (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.	98.107 orang	23.647.505	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes	49.053 orang	2.522.859.530	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat	melitus sesuai standar yang meliputi: 1) Pemeriksaan klinis; 2) Pemeriksaan penunjang; 3) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat); 4) Terapi farmakologi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia, yang meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi; dan 3) Tata laksana	2.616 ODGJ	16.694.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yg diberikan pd orang terduga TBC sesuai standar, yg meliputi: 1) pemeriksaan klinis berdasar kan gejala dan tanda; 2) pe meriksaan penunjang; dan 3) edukasi	21.200 orang	3.009.910.100	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yg Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan ke- sehatan yang diberikan pd orang dengan risiko terinfek- si HIV sesuai standar, yang meliputi: 1) edukasi perilaku berisiko 2) skrining	25.362 orang	652.297.700	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemantauan status gizi balita, ibu hamil, dan wanita usia subur Konsultasi gizi Konseling ASI eksklusif Pem- berian makanan tambahan (PMT) pada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurus Pemberian tablet besi (90 tablet) pd ibu hamil sela- ma masa kehamilan Ke- giatan investigasi dan inter- vensi jika ditemukan masalah gizi, misalnya gizi buruk	1.843 orang	7.276.063.675	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UHC	100 %	98.768.173.865	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03	Bidang PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			207.995.873.503	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			950.620.321	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			950.620.321	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		5 liter/detik	59.303.047	
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa		3.000 SR	717.241.374	
1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		2.750 unit	174.075.900	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			78.914.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			78.914.000	
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		2 unit	78.914.000	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		80 m ³ per hari	353.200.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		24 m ³ per hari	167.224.000	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		75 rumah tangga	447.580.500	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		350 rumah tangga	134.178.000	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		152 unit		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			206.039.232.582	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota			206.039.232.582	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan		8,00 km	82.881.131.670	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan		0,50 km	5.657.398.000	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan		2,32 km	4.136.000.000	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar		4,60 km	49.299.433.819	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan		8 jembatan	3.083.680.750	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan		1 jembatan	2.053.234.750	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan		6 jembatan	21.808.130.255	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan		1,50 km	4.068.000.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04	Bidang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			13.617.285.500	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Ka- wasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			13.617.285.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dg Luas di Bawah 10 Ha			13.617.285.500	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada keluarga miskin	1.000 unit	13.617.285.500	
1.05	Bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA LINMAS			776.186.912	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			776.186.912	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			35.343.276	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	pembentukan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) di daerah rawan bencana dan pemasangan rambu kebencanaan	60 orang UPT SMPN 12	35.343.276	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			9.260.000	
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	pembentukan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), dg prioritas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	10 keluarga (desa Balongpang gang)	9.260.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			731.583.636	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	penyelamatan dan evakuasi dan pemberi-an bantuan logistik terhadap warga terdampak bencana	1.250 orang	731.583.636	
1.06	Bidang SOSIAL			11.076.842.028	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.251.971.852	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota			2.251.971.852	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	pemberian santunan pada marbot, guru ngaji dan penjaga makam sebesar @ Rp. 200.000 x 1 kali dan diberikan saat bulan puasa sebelum lebaran	10.000 orang	2.251.971.852	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			5.008.398.176	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.778.466.327	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu		20 orang	191.558.500	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	bantuan kpd janda dan anak yatim miskin, bantuan alat bantu disabilitas,	17.909 orang	4.471.945.527	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlan- tar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlan- tar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Petirahan anak, jasa pera- watan anak dalam panti, permakanan lansia miskin, respon kasus bayi terlantar, respon kasus sembako fasilitasi bagi keluarga pe- nyandang disabilitas untuk penanganan penyandang disabili-tas sesuai dengan jenis kebutuhannya	105 orang	34.921.250	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	pengiriman penerima man- faat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan keterampilan	22 orang	24.807.000	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	rujukan lansia miskin, jasa perawatan lansia dlm panti, pengiriman remaja putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan keterampilan	53 orang	55.234.050	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			229.931.849	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	pemberian layanan untuk klien yang berada di shelter BLBK Cerme	100 orang	102.776.795	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	pengiriman, penjemputan dan pemulangan PPKS kepada Keluarga	50 orang	55.014.527	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	layanan <i>home visit</i> dan rujukan ODGJ ke RSJ Menur	60 orang	72.140.527	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			3.657.042.815	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	bantuan permakanan bagi anak di LKSA	150 orang x 30 hari	162.737.715	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			162.737.715	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>update</i> dan pemuktahiran DTKS monev pengelolaan data DTKS, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bantuan PKH Inklusif @ Rp.2.000.000	640 orang DTKS	3.494.305.100	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota			52.792.800	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		55.000 keluarga	42.493.575	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.100 orang	3.399.018.725	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			159.429.185	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			159.429.185	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	bantuan dapur umum untuk penyiapan makanan bagi korban bencana alam	5.000 orang	100.310.845	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	pemulangan orang terlan- tar dan penanganan jenazah mr. X	18 OT 12 mr X	34.963.500	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam	120 orang	24.154.840	
2.07	Bidang TENAGA KERJA			9.475.415.260	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			9.363.840.095	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			9.363.840.095	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		140 orang	9.363.840.095	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			111.575.165	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			111.575.165	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	mini <i>jobfair</i> dan pembekalan disabilitas	325 orang	111.575.165	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09	Bidang PANGAN			323.748.720	Dinas Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			323.748.720	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dg Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			230.851.360	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana- an Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			132.689.290	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			98.162.070	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			0	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			92.897.360	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal			92.897.360	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11	Bidang LINGKUNGAN HIDUP			167.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			167.311.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	sosialisasi pengelolaan per- sampahan melalui program Gresik Kawasan Merdeka Sampah dg komponen ka- wasan <i>zero waste</i> , sekolah <i>zero waste</i> , kantor <i>zero waste</i> , pondok pesantren <i>zero waste</i> dan lainnya. pembagian lokasi dibagi di tiga area yakni di Gresik Utara, Selatan dan Tengah. Pembinaan dengan OMS (Fatayat, Muslimat, Nasyia- tul Aisyiyah, ASOBSI, Ecoton, PKK, RDEE, Pattiro) Kab. Gresik, Kampus (UISI, UQ dan UMG) dan melalui pro- gram Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan pengelolaan secara mandiri	20 kelompok	167.311.000	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			167.311.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		untuk peningkatan sirkuler ekonomi masyarakat melalui program GKMS.			
2.13	Bidang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			12.000.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota			12.000.000	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	santunan anak yatim dan fakir miskin	4 x kegiatan PHBI	12.000.000	
2.15	Bidang PERHUBUNGAN			476.016.000	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			391.776.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bantuan tarif Tiket penumpang kapal non cepat rute Gresik - Bawean pp bantuan uang transportasi kapal penyeberangan Bawean - Gresik bantuan uang transportasi kapal penyeberangan Gresik - Bawean	20.734 orang 725 orang 725 orang	391.776.000 290.276.000 50.750.000 50.750.000	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			84.240.000	
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	bantuan BBM untuk perahu penyeberangan perintis Pamona - Pulau Gili PP	390 x 12 liter/bulan	84.240.000	
2.16	Bidang KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			56.717.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			56.717.600	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota			56.717.600	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	kegiatan <i>talkshow</i> dengan tema pencegahan stunting, lingkungan bersih, kesehatan, dan sosial yg dilakukan melalui Program: 1. BIRU (Bincang Seru) 2. Ngopi Kilat 3. SEBAR 4. Niaga 5. Generasi Hebat 6. Podcast Seru 7. berkisah 8.kedai (kajian edukasi agama islam)		32.550.000	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	penyebarluasan informasi melalui <i>flyer</i> dan konten edukasi mengenai stunting, lingkungan bersih, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, maupun infrastruktur rumah tangga		24.167.600	
2.17	Bidang KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			347.566.284	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			42.640.378	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yg Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			42.640.378	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	pemberian fasilitasi penerurusan izin usaha berupa NIB, Halal, PIRT	40 pelaku usaha	38.000.378	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	updating data PLKUMKM		4.640.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			304.925.906	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			304.925.906	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	pelatihan dan pameran/bazar bagi pelaku usaha	80 pelaku usaha	304.925.906	
2.19	Bidang KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			85.000.000	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			85.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.000.000	
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	fasilitasi para seniman dan budayawan lokal, pelaku ekraf, pengelola wisata untuk mempromosikan	1 paket	85.000.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		serta memasarkan produk unggulannya mereka melalui website SIPATU			
2.20	Bidang STATISTIK			44.143.472	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			44.143.472	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			44.143.472	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	menyusun laporan hasil analisis statistik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi-sosial		44.143.472	
2.22	Bidang KEBUDAYAAN			75.000.000	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			75.000.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			75.000.000	
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	pemberian insentif penjaga makam/situs cagar budaya/ objek diduga cagar budaya	75 penerima insentif	75.000.000	
3.25	Bidang KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.167.856.791	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			960.242.325	

4. RENCANA AKSI TAHUNAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota			931.199.600	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	➤ bakti peduli nelayan berdaulat, berupa pemberian bantuan bahan pokok bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena kondisi cuaca ➤ bantuan hibah barang berupa sarana dan prasarana yg digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti alat penangkap ikan dan lainnya.	1.500 orang/ nelayan 9 kelompok	931.199.600 371.199.600 560.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab./Kota			29.042.725	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		60 kelompok	29.042.725	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			207.614.466	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota			207.614.466	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	sosialisasi gemarikan	100 keluarga	120.639.189	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	➢ pelatihan/pembinaan UKM ➢ belanja hibah barang pd badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yg telah memiliki surat keterangan terdaftar	120 pelaku usaha 1 poklahsar	86.975.277 62.156.727 24.818.550	
3.26	Bidang PARIWISATA			258.414.964	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			39.600.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			39.600.000	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	honor pengelola data kunjungan wisata	30 penerima	39.600.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			218.814.964	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			218.814.964	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	woksohop dan bimbingan teknis terkait legalitas HAKI untuk yayasan atau cv atau komunitas	40 orang	218.814.964	
3.27	Bidang PERTANIAN			23.773.665.362	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			22.302.043.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			22.302.043.000	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	pengadaan bantuan fungsi sida, Pupuk (ZA, ZK, SP36), plastik UV, alsintan (mesin perajang tembakau, traktor Roda 2), benih tembakau; P2L		2.295.568.000	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	subsidi pupuk (PHC/POC, NPK , non subsidi)		20.006.475.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			996.697.750	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			996.697.750	
3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	pengadaan bantuan widik		86.400.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	bantuan berupa sumur bor dan sarana pendukungnya	5 paket	910.297.750	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			126.070.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			126.070.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; pertemuan peningkatan tanaman perkebunan		126.070.000	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			533.889.324	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			533.889.324	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	pelatihan peningkatan kualitas tembakau melalui kegiatan demplot (metode penyuluhan pertanian pada petani dg cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman) dan pelatihan pembibitan; pelatihan pene		348.854.612	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.07.2.01.009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	rapan inovasi pengembang an budidaya tembakau, pe- ningkatan kapasitas petani, iuran jaminan ketenagaker- jaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja) pertemuan SL-PHT (Seko- lah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) tanaman tembakau		185.034.712	
3.30	Bidang PERDAGANGAN			70.000.000	Dinas Koperasi Perin- dustrian dan Perdaga- ngan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			70.000.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			70.000.000	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	melakukan pelaporan harga bahan kebutuhan pokok dari 7 pasar; sidak <i>event</i> tertentu; sidak rutin; sosiali- sasi kebijakan sarana perda- ngan dan distribusi perdagangan		70.000.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31	Bidang PERINDUSTRIAN			53.174.975	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			53.174.975	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			53.174.975	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	➤ pemberian pendampingan pd sentra IKM dan IKM, ➤ standardisasi produk (merk gratis, halal <i>self declare</i> gratis, TKDN gratis, kemasan, izin edar, SNI, dll) untuk peningkatan daya saing produk		53.174.975	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.545.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.545.000.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			1.545.000.000	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	bantuan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu	103 orang	1.545.000.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.01	PERENCANAAN			282.174.100	Badan Perencanaan Pembangunan Pene- litian dan Pengemba- ngan Daerah Kab. Gresik
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRO NISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			282.174.100	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			282.174.100	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi dan asistensi pelaksanaan penanggulang an kemiskinan Kab. Gresik	40 Perangkat Daerah	282.174.100	

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Gresik

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	P	K	SK		
(1)	(2)			(3)	(4)
1.01 PENDIDIKAN	1	4	17	147.980.046.827	Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	1	1	14	115.661.352.868	Dinas Kesehatan
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	3	17	207.996.873.503	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	13.617.285.500	Dinas Cipta Karya Perumahan Permukiman
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	3	3	776.186.912	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 SOSIAL	4	6	16	11.076.842.028	Dinas Sosial
2.07 TENAGA KERJA	2	2	2	9.475.415.260	Dinas Tenaga Kerja
2.09 PANGAN	1	2	4	323.748.720	Dinas Pertanian
2.11 LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	167.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	1	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.15 PERHUBUNGAN	1	2	2	476.016.000	Dinas Perhubungan
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	2	56.717.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	3	9	347.566.284	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	1	1	85.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
2.20 STATISTIK	1	1	1	44.143.472	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 KEBUDAYAAN	1	1	1	75.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	3	4	1.167.856.791	Dinas Perikanan
3.26 PARIWISATA	2	2	2	258.414.964	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
3.27 PERTANIAN	4	4	7	23.773.665.362	Dinas Pertanian
3.30 PERDAGANGAN	1	1	1	70.000.000	Dinas Koperasi Industri Perdagangan

Lanjutan table 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	P	K	SK		
(1)	(2)			(3)	(4)
3.31 PERINDUSTRIAN	1	1	1	53.174.975	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	1.545.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
5.01 PERENCANAAN	1	1	1	282.174.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH	36	46	109	535.321.792.166	

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PENUTUP

dokumen

RAT PK 2025 Kab. Gresik

BAB V

PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggu-langan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berikut Rencana Aksi Tahunan (RAT). Diharapkan dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu dokumen ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD ataupun dalam Renja OPD.

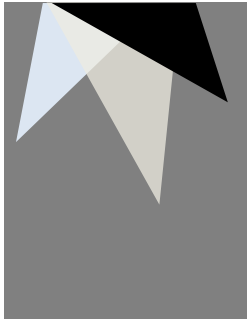
Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, implementasi RAT ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RAT ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



- halaman ini sengaja dikosongkan -





daftar pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2024. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat - Welfare Statistics - 2021. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Gresik 2023. Gresik: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024. Gresik: BPS.

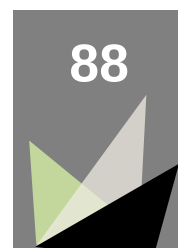
Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 2024. Profil Kesehatan Kabupaten Gresik, 2023. Gresik: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Panduan Praktis Analisis Data untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. Panduan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama. September 2012. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD. Jakarta: TNP2K.



Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

- , <https://www.bdt.tnp2k.go.id>
- , <https://www.bps.go.id>
- , <https://www.jatim.bps.go.id>
- , <https://www.Gresikkab.bps.go.id>
- , <https://www.kemdikbud.go.id>
- , <https://www.kemkes.go.id>
- , <https://www.siskaperbapo.com/harga/tabel>
- , <https://www.tnp2k.go.id>



